

KESIAPAN *E-GOVERNMENT* BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Lucky E. Santoso, Anton T. Argono
Universitas Tarumanagara, Jakarta
Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta
Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta
lesantoso@yahoo.com

Abstract

This research aim determines how ready BKPM in applications e-government and find patterns in resorts immediacy BKPM. Data this research comes from where official BKPM as respondent asked to give immediacy score towards organization management aspect, service management, application, security, network and internet, software, with hardware at his place resort works. This research result shows that in general BKPM enough ready in applications e-government although network aspect and internet with aspect hardware inclined less at resorts BKPM. Also show that resorts at province level inclined more ready in comparison with resorts at regency/city level; and so do resorts at part Indonesian west inclined more ready than resorts at part in Indonesian east.

Keywords: *E-government, Feasibility Study, Indonesia*

Pendahuluan

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berperan sebagai agen layanan investasi pemerintah Indonesia. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, BKPM telah mengambil langkah-langkah guna melaksanakan penerapan *e-government*.

Dalam Instruksi Presiden tersebut disebutkan bahwa penerapan *e-government* di setiap lembaga pemerintah dilaksanakan melalui empat tingkat, yaitu Persiapan, Pematangan, Pemantapan, dan Pemanfaatan. Tingkat Persiapan, Pematangan, dan Pemantapan ini kurang lebih setara dengan tiga fase penerapan *e-government* yang disarankan oleh *Center for Democracy and Technology* dan *infoDev* (2002), yaitu *Publish*, *Interact*, dan *Transact*; sedangkan tingkat Pemanfaatan kurang lebih setara dengan tahap *Connected* dalam evolusi *e-government* versi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations 2008). Dikaitkan dengan empat tingkat tersebut, penerapan *e-government* di BKPM sampai dengan tahun anggaran 2007 dinilai masih berada di tingkat

Pematangan karena sistem-sistem yang sudah dikembangkan, meskipun telah menyediakan layanan publik secara interaktif, belum menyediakan fasilitas transaksi. Dalam upaya mencapai tingkat penerapan *e-government* yang lebih tinggi, sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik demi menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, BKPM membangun Sistem Informasi Manajemen Investasi Terpadu (SIMIT).

SIMIT dirancang untuk menyediakan informasi mengenai peluang investasi, memungkinkan investor untuk memantau permohonan ijin investasi, dan menjadi sarana komunikasi antar instansi-instansi BKPM, yang antara lain terdiri atas para Instansi Penanaman Modal Propinsi (IPMP) dan para Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (IPMK) yang tersebar baik di wilayah Indonesia Bagian Barat maupun di wilayah Indonesia Bagian Timur. Berkenaan dengan hal itu, diperlukan adanya kajian untuk mengetahui kesiapan segenap instansi BKPM dalam penerapan *e-government* pada tingkat yang lebih tinggi ini.

Dalam hal kesiapan *e-government*, Indonesia ditempatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada peringkat ke-106 dari 182

negara di dunia dan ke-7 dari 11 negara di Asia Tenggara. Aspek dengan indeks kesiapan terendah, yaitu 0.0702 (dalam skala 0-1), adalah aspek infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Indeks infrastruktur ini terdiri atas komponen Internet (0.081), PC (0.016), Seluler (0.184), Jalur Telepon Utama (0.068), dan *Broadband* (0.002) (United Nations 2008). Kekurangsiapan dalam aspek infrastruktur ini dapat dimaklumi sebab Indonesia memiliki banyak wilayah yang dipisahkan oleh lautan, pegunungan, dan hutan sehingga tak terjangkau oleh layanan telepon kabel, padahal layanan inilah yang memungkinkan tersedianya akses Internet secara murah. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2004, dari sekitar 72 ribu desa, hanya 30 ribu yang memiliki akses telepon kabel (Rahardjo, Mirchandani, and Joshi 2007). Kurang siapnya Indonesia, terutama dalam aspek infrastruktur ini, diduga dapat mempengaruhi kesiapan instansi-instansi BKPM dalam penerapan *e-government*.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut: Seberapa siapkah instansi-instansi BKPM dalam penerapan *e-government*? Aspek-aspek apa

sajakah yang kurang memadai? (Benarkah bahwa aspek-aspek tersebut adalah yang berhubungan dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi?) Terdapatkah pola-pola dalam kesiapan instansi-instansi BKPM? (Terdapatkah perbedaan kesiapan antara instansi-instansi di wilayah Indonesia Bagian Barat dengan instansi-instansi di wilayah Indonesia Bagian Timur? Antara instansi-instansi di tingkat propinsi dengan instansi-instansi di tingkat kabupaten/kota?)

Metode Penelitian

Data untuk penelitian ini berasal dari hasil survei yang dilakukan oleh salah seorang dari penulis (ATA) di BKPM pada Juli 2006 dalam peran sebagai konsultan PT Sentra Bina Usahatama, Jakarta. Survei tersebut melibatkan hampir semua Instansi Penanaman Modal Propinsi (IPMP), masing-masing beserta sejumlah sampel Instansi Penanaman Modal Kabupaten (IPMK) terkait, dengan komposisi seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Untuk suatu IPMP, banyaknya IPMK terkait yang diambil sebagai sampel ditentukan melalui *purposive sampling* dengan peringkat nilai realisasi investasi di propinsi tersebut sebagai kriteria.

Tabel 1
Daftar IPMP beserta jumlah sampel IPMK

No.	IPMP	Jumlah Sampel IPMK	No.	IPMP	Jumlah Sampel IPMK
1	Bali*	3	17	Papua Barat*	1
2	Banten	3	18	Gorontalo*	1
3	D.I. Yogyakarta	2	19	Sulawesi Tengah*	1
4	DKI Jakarta	-	20	Sulawesi Tenggara*	1
5	Jawa Barat	3	21	Sulawesi Utara*	1
6	Jawa Timur	3	22	Sulawesi Selatan*	2
7	Jawa Tengah	3	23	Kepulauan Bangka Belitung	1
8	Kalimantan Tengah	1	24	Bengkulu	1
9	Kalimantan Barat	1	25	Nanggroe Aceh Darussalam	1
10	Kalimantan Selatan	2	26	Jambi	1
11	Kalimantan Timur	2	27	Lampung	2
12	Maluku*	1	28	Riau	2
13	Maluku Utara*	1	29	Sumatera Barat	1
14	Nusa Tenggara Barat*	2	30	Sumatera Selatan	2
15	Nusa Tenggara Timur*	1	31	Sumatera Utara	2
16	Papua*	1		<i>Total</i>	49

Sumber: Hasil Olahan Data

Catatan: Instansi bertanda (*) berada di wilayah Indonesia Bagian Timur, selebihnya berada di wilayah Indonesia Bagian Barat

Dalam survei tersebut, ditetapkan 10 orang responden untuk setiap IPMP dan 4 orang responden untuk setiap IPMK. Profil responden secara lebih lengkap ditunjukkan pada Tabel 2. Tiap responden diminta untuk memberikan skor dalam skala ordinal tiga titik (1 = Kurang Memadai, 2 = Cukup Memadai, 3 = Memadai) terhadap sejumlah aspek di instansi tempat dia bekerja. Aspek-aspek apa saja yang dinilai oleh seorang responden tergantung pada jabatan

responden tersebut, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.

Kedelapan aspek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil olahan dari daftar infrastruktur utama pengembangan *e-governement* di lembaga pemerintah yang terdapat pada panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (2003).

Tabel 2
Profil responden beserta aspek-aspek yang dinilai

Aspek	IPMP			IPMK		
	Ka. Satker	Ka. Bag.	Staf Pengelola TI	Ka. Satker	Ka. Bag.	Staf Pengelola TI
Sumber Daya Manusia	√	√	√	√	√	√
Manajemen Organisasi	√	√	√	√	√	√
Manajemen Pelayanan	√	√	√	√	√	√
Aplikasi			√			√
Security			√			√
Jaringan dan Internet			√			√
Software			√			√
Hardware			√			√
Jumlah Responden per Instansi	1	4	5	1	1	2

Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan hasil survei tersebut kemudian ditentukan skor kesiapan untuk masing-masing instansi dalam masing-masing aspek. Skor kesiapan untuk suatu instansi ditentukan dengan cara menghitung skor median dari keseluruhan responden yang bekerja di instansi tersebut.

Selanjutnya digunakan statistik deskriptif dan uji-uji non-parametrik untuk membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ditemukan bahwa hanya 3 instansi, yaitu IPMP DKI Jakarta, IPMP Riau, dan IPMP Kalimantan Timur, yang memiliki skor kesiapan 3 (Memadai). Di pihak lain terdapat 4 IPMP dan 13 IPMK yang memiliki skor kesiapan 1 (Kurang Memadai).

Skor median untuk keseluruhan instansi dalam penelitian ini adalah 2 (Cukup Memadai). Distribusi skor dalam tiap aspek ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Distribusi skor kesiapan

Aspek	N	Distribusi Skor (%)					Skor Median
		1	1.5	2	2.5	3	
Sumber Daya Manusia	80	6.3	0.0	70.0	1.3	22.5	2
Manajemen Organisasi	80	27.5	1.3	62.5	0.0	8.8	2
Manajemen Pelayanan	80	11.3	1.3	63.8	2.5	21.3	2
Aplikasi	80	17.5	3.8	61.3	1.3	16.3	2
Security	80	40.0	5.0	43.8	5.0	6.3	2
Jaringan dan Internet	80	65.0	7.5	21.3	1.3	5.0	1
Software	80	40.0	0.0	51.3	0.0	8.8	2
Hardware	80	58.8	1.3	30.0	1.3	8.8	1
Total	640	33.3	2.5	50.5	1.6	12.2	2

Sumber: Hasil Olahan Data

Terlihat bahwa skor median dalam aspek Jaringan dan Internet serta aspek *Hardware* adalah 1 (Kurang Memadai), lebih rendah daripada skor median dalam aspek-aspek lainnya. Uji Friedman yang juga dilakukan menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan yang signifikan ($p < 0.01$) antara distribusi skor dalam setidaknya dua aspek.

Berikutnya dibandingkan distribusi skor untuk IPMP dan untuk IPMK. Meskipun skor median untuk IPMP dan IPMK adalah sama, yaitu 2 (Cukup Memadai), namun uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa skor untuk IPMP lebih tinggi secara signifikan ($p < 0.01$) daripada skor untuk IPMK. Perbandingan dalam tiap aspek ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Perbandingan distribusi skor kesiapan antara IPMK dan IPMP

Aspek		N	Distribusi Skor (%)					Skor Median
			1	1.5	2	2.5	3	
Sumber Daya Manusia	IPMK	49	6.1	0.0	63.3	2.0	28.6	2
	IPMP	31	6.5	0.0	80.6	0.0	12.9	2
Manajemen Organisasi	IPMK	49	34.7	0.0	59.2	0.0	6.1	2
	IPMP	31	16.1	3.2	67.7	0.0	12.9	2
Manajemen Pelayanan	IPMK	49	16.3	2.0	59.2	4.1	18.4	2
	IPMP	31	3.2	0.0	71.0	0.0	25.8	2
Aplikasi	IPMK	49	22.4	6.1	57.1	2.0	12.2	2
	IPMP	31	9.7	0.0	67.7	0.0	22.6	2
Security*	IPMK	49	46.9	8.2	38.8	4.1	2.0	1.5
	IPMP	31	29.0	0.0	51.6	6.5	12.9	2
Jaringan dan Internet**	IPMK	49	77.6	8.2	10.2	2.0	2.0	1
	IPMP	31	45.2	6.5	38.7	0.0	9.7	1.5
Software*	IPMK	49	46.9	0.0	51.0	0.0	2.0	2
	IPMP	31	29.0	0.0	51.6	0.0	19.4	2
Hardware*	IPMK	49	67.3	2.0	28.6	0.0	2.0	1
	IPMP	31	45.2	0.0	32.3	3.2	19.4	2

Sumber: Hasil Olahan Data

Catatan: * $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

Uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa skor untuk IPMP lebih tinggi secara signifikan daripada skor untuk IPMK dalam aspek *Security*, Jaringan dan Internet, Software, serta Hardware.

Selanjutnya dibandingkan distribusi skor untuk instansi di wilayah Indonesia Bagian Barat dan untuk instansi di wilayah Indonesia Bagian Timur. Meskipun skor median untuk instansi di wilayah Indonesia Bagian Barat dan instansi di wilayah Indonesia Bagian Timur adalah sama, yaitu 2 (Cukup Memadai), namun

uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa skor untuk instansi di wilayah Indonesia Bagian Barat lebih tinggi secara signifikan ($p < 0.01$) daripada skor untuk instansi di wilayah Indonesia Bagian Timur. Perbandingan dalam tiap aspek ditunjukkan pada Tabel 5.

Uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa skor untuk instansi di wilayah Indonesia Bagian Barat lebih tinggi secara signifikan daripada skor untuk instansi di wilayah Indonesia Bagian Timur dalam aspek Manajemen Pelayanan, *Security*, Jaringan dan Internet, serta Software.

Tabel 5
Perbandingan distribusi skor kesiapan antara instansi di wilayah Indonesia Bagian Barat dan di wilayah Indonesia Bagian Timur

Aspek	n	Distribusi Skor (%)					Skor	
		1	1.5	2	2.5	3	Median	
Sumber Daya Manusia	IBB	52	3.8	0.0	71.2	1.9	23.1	2
	IBT	28	10.7	0.0	67.9	0.0	21.4	2
Manajemen Organisasi	IBB	52	26.9	0.0	59.6	0.0	13.5	2
	IBT	28	28.6	3.6	67.9	0.0	0.0	2
Manajemen Pelayanan **	IBB	52	7.7	1.9	55.8	3.8	30.8	2
	IBT	28	17.9	0.0	78.6	0.0	3.6	2
Aplikasi	IBB	52	11.5	3.8	65.4	1.9	17.3	2
	IBT	28	28.6	3.6	53.6	0.0	14.3	2
Security **	IBB	52	30.8	5.8	46.2	7.7	9.6	2
	IBT	28	57.1	3.6	39.3	0.0	0.0	1
Jaringan dan Internet **	IBB	52	51.9	11.5	26.9	1.9	7.7	1
	IBT	28	89.3	0.0	10.7	0.0	0.0	1
Software **	IBB	52	28.8	0.0	57.7	0.0	13.5	2
	IBT	28	60.7	0.0	39.3	0.0	0.0	1
Hardware	IBB	52	53.8	0.0	32.7	0.0	13.5	1
	IBT	28	67.9	3.6	25.0	3.6	0.0	1

Sumber: Hasil Olahan Data

Catatan: ** p < 0.01

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa secara umum instansi-instansi BKPM dapat dimasukkan dalam kategori cukup memadai sehingga dapat dikatakan bahwa instansi-instansi BKPM cukup siap dalam penerapan *e-government*. Aspek jaringan dan Internet serta aspek *hardware* secara umum perlu dicermati karena aspek-aspek tersebut cenderung kurang memadai di instansi-instansi BKPM. Hal ini menunjukkan bahwa kasus BKPM tidaklah menyimpang dari kecenderungan umum, yaitu relatif rendahnya kesiapan *e-government* di Indonesia dalam aspek infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Hasil penelaahan lebih lanjut menunjukkan bahwa instansi-instansi BKPM di tingkat propinsi lebih memadai dalam aspek *security*, jaringan dan Internet, *software*, serta *hardware* jika dibandingkan dengan instansi-instansi di tingkat kabupaten/kota, sehingga cenderung lebih siap dalam penerapan *e-government*. Demikian juga instansi-instansi BKPM di wilayah Indonesia Bagian Barat cenderung lebih siap daripada instansi-instansi di wilayah Indonesia Bagian Timur karena instansi-instansi di wila-

yah Indonesia Bagian Barat memiliki keunggulan dalam aspek manajemen pelayanan, *security*, jaringan dan Internet, serta *software*.

Dalam kasus BKPM ini dapat diusulkan agar penerapan *e-government* dilakukan secara bertahap dengan pemberian prioritas pada instansi-instansi yang lebih siap, yaitu instansi-instansi di tingkat propinsi, khususnya yang ada di wilayah Indonesia Bagian Barat. Penerapan sistem ini tentunya dilakukan setelah dibenahinya aspek-aspek yang belum memadai di masing-masing instansi.

Daftar Pustaka

Center for Democracy and Technology, and infoDev, “*The e-government handbook for developing countries*”, Center for Democracy and Technology, Washington, DC, 2002.

Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, “Panduan penyusunan rencana induk pengembangan *e-government* lembaga”, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jakarta, 2003.

Rahardjo, Edhy, Dinesh Mirchandani, and Kailash Joshi, "*E-government functionality and website features: A case study of Indonesia*", *Journal of Global Information Technology Management* 10, no. 1, 2007.

United Nations, "*United Nations e-government survey 2008: From e-government to connected governance*", United Nations Publication, New York, 2008.